

## **Analisis Dampak Konflik India-Pakistan (Kashmir) Terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan Asia Selatan**

**Bilqis Salsabilla Thahany<sup>1\*</sup>, Esti Theda Anora<sup>1</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [salsabillabilqis51@gmail.com](mailto:salsabillabilqis51@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received : 19-01-2026

Accepted : 08-02-2026

**Keywords:** Konflik Kashmir;  
India-Pakistan; Keamanan  
Regional; Asia Selatan; Stabilitas  
Kawasan

### **ABSTRAK**

Konflik India-Pakistan yang berakar pada sengketa wilayah Kashmir telah berlangsung sejak tahun 1947 dan menjadi salah satu konflik paling kompleks di kawasan Asia Selatan. Konflik ini tidak hanya memicu empat kali perang bersenjata, tetapi juga melahirkan krisis kemanusiaan yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan terhadap warga sipil, serta instabilitas politik yang berkelanjutan. Ketegangan semakin meningkat pasca pencabutan Pasal 370 oleh Pemerintah India pada tahun 2019, yang menghapus status otonomi khusus Jammu dan Kashmir. Dampak konflik tersebut melampaui batas teritorial kedua negara dan berimplikasi langsung terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Selatan, termasuk meningkatnya perlombaan senjata nuklir, modernisasi militer, serta eskalasi terorisme dan aktivitas kelompok militan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik Kashmir terhadap arsitektur keamanan regional Asia Selatan serta mengkaji tantangan dalam upaya resolusi konflik yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan resolusi konflik, baik melalui mekanisme bilateral, organisasi regional seperti SAARC, maupun intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, disebabkan oleh sikap politik India dan Pakistan yang saling berseberangan dan tidak kompromistis. Konflik Kashmir hingga saat ini tetap menjadi faktor utama yang mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Selatan.

---

## **PENDAHULUAN**

Konflik antara India dan Pakistan merupakan salah satu konflik geopolitik paling berkepanjangan di kawasan Asia Selatan sejak kedua negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Konflik ini berakar pada perbedaan pandangan mengenai dasar kenegaraan, identitas keagamaan, serta sengketa wilayah Kashmir yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang komprehensif. Perselisihan tersebut telah memicu empat perang bersenjata dan berbagai ketegangan militer yang berulang, menjadikan Kashmir sebagai titik api utama dalam hubungan bilateral India-Pakistan (Khaeruddin, 2021).

Secara konseptual, sengketa merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan sosial dan politik, terutama ketika terdapat ketimpangan kepentingan, distribusi kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya. Konflik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui tahapan tertentu, mulai dari gesekan awal hingga eskalasi yang dapat berujung pada kekerasan terbuka. Dalam konteks hubungan internasional, konflik sering kali bersifat multidimensional, mencakup aspek politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Sengketa

Kashmir merepresentasikan pola konflik semacam ini, di mana ketidakseimbangan kedaulatan politik, rivalitas strategis, dan identitas kolektif berkelindan dalam satu krisis yang kompleks dan berlarut-larut.

Wilayah Kashmir sendiri terbagi ke dalam tiga otoritas administratif, yaitu India, Pakistan, dan Tiongkok. Jammu dan Kashmir berada di bawah kendali India, Azad Kashmir berada di bawah yurisdiksi Pakistan, sementara wilayah Aksai Chin dikuasai oleh Tiongkok. Pembagian wilayah ini tidak hanya memicu persaingan teritorial antarnegara, tetapi juga menimbulkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan bagi masyarakat setempat. Penolakan sebagian besar penduduk Muslim di Jammu dan Kashmir terhadap integrasi penuh dengan India, serta tuntutan kemerdekaan atau penggabungan dengan Pakistan, semakin memperumit dinamika konflik (Rizki & Muquita, 2023).

Situasi konflik tersebut berdampak langsung pada kehidupan penduduk Kashmir yang berada dalam posisi sangat rentan. Eskalasi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, penahanan sewenang-wenang, serta korban sipil akibat bentrokan bersenjata menjadi realitas yang terus berulang. Ketegangan meningkat secara signifikan pasca pencabutan Pasal 370 Konstitusi India pada tahun 2019 yang mengakhiri status otonomi khusus Jammu dan Kashmir. Kebijakan ini tidak hanya mengubah struktur pemerintahan dan administrasi wilayah tersebut, tetapi juga memicu perubahan aturan kepemilikan lahan yang memperdalam ketidakpuasan masyarakat lokal serta memperbesar potensi konflik horizontal (Khairunnisa, 2021).

Lebih jauh, konflik Kashmir tidak dapat dipahami semata sebagai konflik bilateral antara India dan Pakistan, melainkan telah berkembang menjadi isu keamanan kawasan Asia Selatan. Ketegangan yang terus berlanjut berpotensi memicu proliferasi senjata nuklir, meningkatkan aktivitas terorisme lintas batas, serta memperburuk hubungan diplomatik antarnegara di kawasan tersebut (Fajrin, et. Al., 2024). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara Asia Selatan karena instabilitas di Kashmir dapat berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas.

Berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) berperan sebagai institusi regional yang berupaya memediasi konflik India–Pakistan, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa turut memberikan perhatian melalui resolusi dan misi pemantauan. Namun demikian, efektivitas upaya-upaya tersebut masih terbatas. Sikap keras kedua negara, ditambah dengan keterlibatan aktor-aktor global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia Selatan, menjadi tantangan utama dalam proses resolusi konflik yang berkelanjutan.

Meskipun telah banyak kajian yang membahas konflik Kashmir dari perspektif historis dan bilateral, kajian yang secara khusus menganalisis dampak konflik India–Pakistan terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Selatan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik Kashmir terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Selatan serta mengidentifikasi tantangan utama dalam upaya resolusi konflik di tingkat regional dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik Kashmir serta dampaknya terhadap stabilitas

keamanan kawasan Asia Selatan. Pendekatan deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi dan menjelaskan fenomena sosial-politik secara sistematis berdasarkan data yang tersedia, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif dan kontekstual (Vardiansyah, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, dokumen resmi, serta pemberitaan media massa cetak dan digital yang berkaitan dengan konflik India–Pakistan dan isu keamanan kawasan Asia Selatan. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif untuk memastikan validitas dan relevansi data dengan fokus penelitian.

Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, melalui tahapan pengorganisasian data, reduksi informasi, dan pengelompokan tema-tema utama yang berkaitan dengan dinamika konflik Kashmir, dampaknya terhadap stabilitas keamanan regional, serta tantangan dalam upaya resolusi konflik. Melalui proses analisis ini, penelitian berupaya memetakan secara sistematis konsekuensi konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan terhadap arsitektur keamanan kawasan Asia Selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi mengenai keamanan regional telah bertransformasi menjadi salah satu pilar utama dalam diskursus politik internasional, terutama sejak berakhirnya era Perang Dingin. Runtuhnya struktur bipolaritas yang sebelumnya didominasi oleh persaingan hegemonik antara dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet, secara fundamental telah mengubah peta orientasi strategis dunia. Pergeseran paradigma ini mengakibatkan fokus stabilitas global yang semula terpusat pada persaingan kekuatan super power kini terdesentralisasi menjadi pengawasan terhadap dinamika keamanan di tingkat kawasan. Setiap kawasan memiliki karakteristik yang berbeda-beda termasuk pada segi keamanan. Di Asia Selatan, keamanan merupakan faktor penting bagi stabilitas kawasan. Masalah yang terjadi pada kawasan Asia Selatan terjadi karena tidak ada rasa saling percaya antar negara. Karena tidak adanya kepercayaan antar negara menyebabkan mudah terjadi konflik terutama dibidang keamanan dan perang yang hingga kini masih menjadi masalah yang berlanjut.

Lanskap keamanan di Asia Selatan diwarnai oleh spektrum ancaman yang sangat beragam, mencakup persengketaan teritorial, arus imigran ilegal serta pengungsi, ancaman terorisme, hingga perlombaan senjata nuklir yang berisiko tinggi. Di kawasan ini, sengketa mengenai batas wilayah menjadi fenomena yang kerap melibatkan negara-negara yang bertetangga secara langsung dan memicu ketegangan diplomatik. Manifestasi dari perebutan wilayah tersebut nampak jelas pada perselisihan berkepanjangan di Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan, sengketa garis Durand yang menjadi titik gesekan antara Pakistan dan Afghanistan, serta perdebatan mengenai pengelolaan sumber daya air di aliran sungai Gangga yang melibatkan kepentingan India dan Bangladesh. Konflik perebutan wilayah Kashmir ini menjadi perhatian dunia dikarenakan ketegangan yang tidak kunjung reda. Keamanan di Asia Selatan dapat menjadi rentan karena konflik keamanan seperti Perebutan wilayah, terorisme, nuklir, dan konflik keamanan lainnya. Negara Kawasan Asia Selatan khawatir konflik antara India dan Pakistan menyebar dan mempengaruhi keamanan negara lain di kawasan.

Perseteruan di wilayah Kashmir telah berevolusi menjadi krisis yang jauh lebih kompleks, di mana eskalasinya kini bersinggungan dengan isu-isu global seperti ancaman terorisme lintas batas dan perlombaan senjata nuklir di kawasan. Meluasnya dimensi konflik ini dipacu oleh perpaduan berbagai elemen dasar yang saling mengunci, mulai dari sentimen keagamaan dan ambisi politik domestik hingga pertimbangan keamanan strategis serta kepentingan geopolitik yang lebih luas. Sejak pecah pertama kali pada tahun 1947, ketegangan ini telah memicu setidaknya tiga konfrontasi militer berskala besar serta rangkaian kerusuhan maupun gesekan senjata dalam skala lebih kecil. Masyarakat dan warga sipil juga terlibat dan bahkan menjadi korban atas konflik kedua negara ini. Hal ini menjadi perhatian keamanan kawasan Asia Selatan. Dominasi kekuatan militer di kawasan Asia Selatan terpusat pada persaingan antara India dan Pakistan sebagai dua kekuatan utama yang terjebak dalam pusaran security dilemma. Eskalasi persenjataan di wilayah ini dipicu oleh ekspansi militer India secara masif yang diinterpretasikan oleh Pakistan sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan mereka.

Ambisi strategis India untuk membangun basis kekuatan udara serta menempatkan personel militer di sepanjang perbatasan, ditambah dengan aspirasi mereka untuk menjadi kekuatan hegemonik baik di level regional maupun global, telah memaksa Pakistan untuk secara proaktif meningkatkan kapabilitas militer dan pertahanannya. Langkah tersebut diambil Pakistan sebagai upaya penyeimbang atau untuk membendung dominasi India yang semakin agresif. Bagi Pakistan, pilihan untuk tetap pasif tanpa melakukan modernisasi kekuatan militer dianggap sebagai langkah berisiko tinggi yang dapat mengakibatkan hilangnya kontrol atas wilayah Kashmir sekaligus menjadi bentuk pengakuan kekalahan secara de facto di hadapan otoritas India (Khaeruddin, 2021). Berdasarkan data yang dirilis oleh Global Fire Power pada tahun 2019, India mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan militer terbesar keempat di dunia, tepat di bawah dominasi Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Peringkat ini mencerminkan komitmen India yang sangat konsisten dalam memperkuat eksistensi militer mereka di panggung internasional secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pada periode yang sama, Pakistan menempati urutan ke-15 dalam peta kekuatan militer global, di mana posisi ini sebenarnya menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian mereka pada tahun 2016. Penilaian terhadap kekuatan pertahanan ini didasarkan pada bobot indikator yang sangat spesifik, yang mencakup alokasi poin untuk personel aktif, kepemilikan tank, helikopter serang, armada pesawat, serta bobot prioritas tertinggi pada kepemilikan kapal induk dan kapal selam. Perbedaan peringkat yang cukup lebar antara kedua negara ini juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembangunan mereka yang berbeda. India, dengan sistem politik demokrasi yang matang serta stabilitas ekonomi yang lebih kuat, memiliki daya dukung finansial yang lebih besar dibandingkan Pakistan untuk membiayai proses modernisasi alutsista dan teknologi pertahanannya.

### **Upaya Resolusi Konflik Kashmir**

Hubungan antara India dan Pakistan ditandai oleh rekam jejak perselisihan historis yang sangat panjang dan kompleks, terutama terkait sengketa di wilayah Kashmir. Bagi kedua negara, pencapaian resolusi atas konflik tersebut menjadi agenda yang sangat krusial mengingat posisi mereka yang kerap bersinggungan dalam berbagai platform kerja sama internasional, baik di tingkat global melalui keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun di tingkat regional. Sebagai dua kekuatan utama di Asia Selatan, India dan

Pakistan memiliki tanggung jawab strategis yang sama karena keduanya merupakan tokoh sentral sekaligus pendiri organisasi regional South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) (Payapo, 2014). SAARC, yang merupakan singkatan dari South Asian Association for Regional Cooperation merupakan organisasi internasional yang mengkonsolidasikan delapan negara di kawasan Asia Selatan dengan fokus utama pada integrasi ekonomi dan stabilitas politik. Pendirian asosiasi ini didasarkan pada visi untuk memperkokoh kemandirian di antara negara-negara anggotanya, sekaligus berfungsi sebagai instrumen diplomatik strategis untuk meredakan ketegangan dan mengupayakan perdamaian dalam sengketa antara India dan Pakistan. Momentum positif dalam hubungan bilateral kedua negara sempat terlihat pada pelaksanaan KTT ke-10 di Colombo, Sri Lanka, pada Juli 1998, ketika Perdana Menteri India, Atal Bihari Vajpayee, dan Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, mencapai kesepakatan untuk mempererat kerja sama yang ditindaklanjuti dengan negosiasi di Kota Lahore (Aisy & Rohadatul, 2015).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peranan sentral sebagai aktor internasional yang berupaya memediasi penyelesaian sengketa wilayah di Kashmir antara India dan Pakistan. Keterlibatan institusi global ini bermula dari inisiatif Gubernur Jenderal India, Lord Mountbatten, bersama Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, yang mengusulkan agar PBB bertindak sebagai pengawas dalam forum-forum pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah India guna mencari jalan keluar atas konflik tersebut. Kehadiran PBB sebagai pihak penengah mendapatkan legitimasi yang kuat setelah Perdana Menteri Pakistan, Liaquat Ali Khan, menyatakan persetujuannya untuk melibatkan organisasi tersebut dalam proses diplomasi (Payapo, 2014). Dewan Keamanan PBB telah menunjukkan peran aktifnya dengan menerbitkan serangkaian resolusi strategis guna menangani sengketa Kashmir pada periode 1948 hingga 1950. Kemajuan signifikan dalam upaya perdamaian ini tercapai pada tanggal 20 Januari 1948 melalui pembentukan United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP), yang beranggotakan perwakilan dari Amerika Serikat, Belgia, dan Argentina. Sebagai hasil kerja komisi tersebut, lahirlah resolusi pertama pada 13 Agustus 1948 yang memuat penegasan komitmen dari pemerintah India dan Pakistan bahwa penentuan status masa depan wilayah Kashmir harus didasarkan sepenuhnya pada aspirasi dan kehendak rakyat setempat. Langkah diplomasi ini kemudian diperkuat dengan terbitnya resolusi kedua pada 5 Januari 1949, yang secara spesifik mengamanatkan bahwa proses integrasi wilayah Kashmir, baik ke dalam kedaulatan India maupun Pakistan, wajib dilaksanakan melalui mekanisme demokratis yang bebas, transparan, dan tidak memihak (Payapo, 2014).

Strategi penyelesaian yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani sengketa Kashmir senantiasa memprioritaskan pendekatan tanpa kekerasan melalui jalur diplomasi dan kesepakatan damai. Namun, terlepas dari berbagai instrumen hukum dan resolusi yang telah dirumuskan secara formal, upaya internasional tersebut belum membuahkan hasil signifikan dalam memulihkan hubungan bilateral antara India dan Pakistan.

### **Dampak Konflik Kashmir Pada Kawasan Asia Selatan**

Konflik India dan Pakistan ini membawa pengaruh besar bagi keamanan regional terutama kawasan Asia Selatan. Ketegangan dan konflik yang berkepanjangan dapat memicu intervensi dari kekuatan besar dan berpotensi mengganggu stabilitas regional dan global. Karena kedua negara baik India maupun Pakistan merupakan negara yang mempunyai kekuatan militer yang sangat besar sehingga konflik ini sangat bisa berpotensi memperbesar

eskalasi yang dapat menyebabkan dampak domino di kawasan sekitarnya, memicu konflik baru dan memperburuk hubungan antar negara-negara lain yang terlibat. Eskalasi aktivitas terorisme di kawasan Asia Selatan telah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan, sebagaimana dikonfirmasi oleh data *Global Terrorism Index* (GTI) tahun 2019 yang menempatkan wilayah ini di peringkat kedua global sebagai kawasan dengan dampak serangan dan tingkat kematian tertinggi pada tahun 2018. Secara historis, selama hampir dua dekade terakhir, Asia Selatan secara konsisten mencatatkan skor kerentanan terorisme yang melampaui wilayah lain di dunia, dengan total korban jiwa mencapai lebih dari 67.500 orang dalam rentang waktu antara 2002 hingga 2018.

Kondisi ini diperparah oleh kehadiran jaringan kelompok militan yang sangat variatif dan berbahaya, mulai dari Al-Qaeda, Taliban, dan Khorasan Chapter of Islamic State (ISK) yang mendominasi wilayah Pakistan serta Afghanistan, hingga kelompok Maois beraliran kiri ekstrem dan Lashkar-e-Tayyiba di India, serta berbagai faksi yang berafiliasi dengan ISIS. Tantangan penanggulangan terorisme di kawasan ini menjadi sangat kompleks karena para sel teroris sering kali memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai tempat persembunyian strategis dengan berbaur di tengah masyarakat sipil, sehingga menyulitkan otoritas keamanan negara untuk mengidentifikasi keberadaan mereka secara akurat. Berdasarkan laporan GTI 2019, kerawanan ini terlihat jelas pada posisi tiga negara utama di Asia Selatan, yaitu Afghanistan, Pakistan, dan India, yang semuanya masuk ke dalam daftar sepuluh negara dengan dampak terorisme paling parah di dunia. Evolusi kekuatan nuklir di Asia Selatan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan eskalasi sengketa wilayah Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan. Dalam konstelasi ini, hubungan kedua negara dipandang sebagai interaksi zero-sum, di mana kemajuan strategis yang dicapai oleh salah satu pihak secara otomatis dipersepsikan sebagai ancaman atau kerugian bagi pihak lainnya.

Perseteruan sengit di Kashmir inilah yang akhirnya menjadi titik pemicu utama bagi perlombaan senjata nuklir di antara kedua negara tersebut. Meskipun inisiasi pengembangan nuklir telah berlangsung sejak dekade 1970-an, ketegangan tersebut mencapai puncaknya yang sangat krusial pada tahun 1999 melalui Perang Kargil, yang menandai dimulainya persaingan nuklir secara terbuka dan terus membayangi stabilitas keamanan regional hingga saat ini. Pada fase awal, baik India maupun Pakistan memfokuskan program nuklir mereka untuk pemanfaatan energi damai; namun, seiring dengan memburuknya situasi di Kashmir, teknologi tersebut dialihfungsikan menjadi instrumen militer untuk memperkuat daya tawar dan kapabilitas pertahanan masing-masing (Javaid, 2015). Secara hukum internasional, status nuklir kedua negara ini tetap berada dalam posisi yang unik sekaligus problematik, karena meskipun mereka secara faktual memiliki hulu ledak nuklir, mereka tidak diakui sebagai Negara Pemilik Senjata Nuklir (Nuclear Weapon State) secara *de jure*.

Modernisasi kekuatan pertahanan di Asia Selatan tidak hanya terbatas pada persaingan antara India dan Pakistan, tetapi juga merambah ke negara-negara lain di kawasan tersebut yang mulai melakukan pembaruan militer secara sistematis. Percepatan kapabilitas militer yang sangat masif oleh India dan Pakistan telah memicu kecemasan kolektif akan potensi pecahnya perang terbuka yang dapat mendestabilisasi seluruh kawasan. Fenomena ini menciptakan *security dilemma* yang signifikan, khususnya bagi negara-negara tetangga dengan kekuatan militer yang lebih terbatas, yang merasa terancam oleh dominasi persenjataan dua kekuatan utama tersebut. Sebagai respons terhadap ketidakpastian keamanan ini, negara-

negara kecil di sekitarnya mulai berupaya meningkatkan kapasitas pertahanan mereka, baik melalui pengalokasian anggaran militer yang lebih besar maupun dengan membangun kemitraan strategis dengan kekuatan eksternal di luar Asia Selatan demi menjaga keseimbangan stabilitas nasional mereka.

Dalam upaya mendukung modernisasi militer dan menunjang pertahanan militernya, baik India maupun Pakistan membuat kebijakan luar negeri. Salah satu bukti kebijakan ofensif India terhadap Pakistan adalah pada bulan Februari 2019. Pada tanggal 26-27 Februari 2019, terjadi aksi saling serang antara India dan Pakistan. Angkatan udara India memasuki wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan dan menembaki kelompok militan Jaish-e-Mohammad (JeM) yang berbasis di Pakistan. India mengakui telah melakukan serangan dan membunuh sejumlah besar militan JeM termasuk komandan, pelatih dan kelompok yang sedang dilatih fidayeen atau bunuh diri dengan menembaki kamp-kamp kelompok militan JeM. Serangan angkatan udara India dipicu oleh bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok militan JeM pada 14 Februari 2019 dan menewaskan 40 tentara cadangan sentral di distrik Pulwama, wilayah Kashmir yang dikuasai India.

Serupa dengan orientasi strategis India, Pakistan juga mengadopsi postur kebijakan yang ofensif sebagai respons terhadap setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan serta pertahanan nasionalnya. Manifestasi dari kebijakan luar negeri Pakistan yang konfrontatif terhadap India terlihat jelas dalam insiden Pulwama pada Februari 2019, di mana militer Pakistan melancarkan tindakan tegas dengan menembak jatuh dua pesawat tempur India yang dinilai telah melanggar batas wilayah udara di Kashmir yang berada dalam kontrol Pakistan. Sebagaimana ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Mohammad Faisal, langkah tersebut merupakan unjuk kekuatan sekaligus pembuktian atas hak serta kapasitas Pakistan dalam menjaga integritas wilayahnya. Meskipun Pakistan menyatakan tidak berkeinginan untuk memicu eskalasi permusuhan yang lebih luas, otoritas mereka menegaskan kesiapan penuh untuk mengambil tindakan ofensif apabila situasi keamanan memaksa.

Pada fase awal persengketaan Kashmir, dinamika konflik didominasi secara eksklusif oleh interaksi antara pihak India, Pakistan, dan entitas Kashmir sendiri, tanpa adanya keterlibatan kelompok militansi terorganisir yang memperebutkan wilayah tersebut. Namun, kegagalan berkelanjutan dalam mencapai resolusi damai selama berdekade-dekade telah menciptakan kekosongan stabilitas yang memicu kemunculan berbagai faksi militan yang kemudian menetapkan basis operasional mereka di tanah Kashmir. Fenomena proliferasi kelompok bersenjata ini tidak hanya terisolasi di wilayah sengketa atau di dalam yurisdiksi India dan Pakistan saja, melainkan telah meluas hingga menyentuh hampir seluruh penjuru kawasan Asia Selatan (Mukti & Puspitasari, 2020).

## **KESIMPULAN**

Konflik India–Pakistan yang berakar pada sengketa wilayah Kashmir sejak tahun 1947 telah berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Selatan. Konflik ini dipicu oleh perebutan wilayah, perbedaan identitas agama, serta kekhawatiran terhadap stabilitas politik masing-masing negara. Pembagian wilayah Kashmir dan penolakan sebagian masyarakat Muslim Jammu-Kashmir terhadap integrasi dengan India telah memicu krisis

kemanusiaan yang ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia, jatuhnya korban sipil, dan praktik penahanan sewenang-wenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Kashmir telah melampaui dimensi bilateral dan menjadi isu keamanan regional, yang tercermin dalam meningkatnya perlombaan senjata nuklir antara India dan Pakistan sejak Perang Kargil 1999, serta meluasnya ancaman terorisme lintas batas di kawasan Asia Selatan. Kegagalan resolusi konflik turut memperburuk kondisi keamanan kawasan dengan memicu modernisasi militer negara-negara Asia Selatan lainnya yang merasa terancam oleh dominasi kekuatan militer India dan Pakistan.

Upaya resolusi konflik yang dilakukan melalui mekanisme regional SAARC maupun intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga saat ini belum membuahkan hasil yang berkelanjutan. Ketidapatuhan terhadap resolusi PBB serta sikap keras kedua negara menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya perdamaian. Oleh karena itu, konflik Kashmir tetap menjadi sumber instabilitas keamanan kawasan Asia Selatan dan memerlukan pendekatan resolusi yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada keamanan regional serta perlindungan hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aisy & Rohadatul, A. S. (2015). Peran Organisasi Internasional dalam Menangani Konflik Regional: Studi Kasus SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) dalam Konflik India dan Pakistan. *Journal of Governance and Public Policy*, 5(1), 1–7.
- [2] Akbar, I. (2024). Konflik India-Pakistan implikasinya terhadap keamanan di wilayah Kashmir melalui perspektif neorealisme. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(3), 73–78.
- [3] Butt, H. A. (2024). Kashmir dispute: India vs Pakistan and its influence on South Asia and global power. *Journal of Regional Studies Review*. <https://doi.org/10.62843/jrsr/2024.3a037>
- [4] Fajrin, A. F. A. M., Tamaela, M. D. G., & Siswatinigrum, E. (2024). Geopolitik perbatasan Kashmir studi kasus: Pengaruh konflik India-Pakistan terhadap keamanan global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 3(1), 85–99. <https://doi.org/10.47354/jihif.v3i1.958>
- [5] Hakim, A. B., & Sadiyin, M. (2022). Khasmir dalam pusaran konflik antara India dan Pakistan. *Journal of International Relations (JoS)*, 2(1), 40–49.
- [6] Hashmat, S. A. (2025). Kashmir dispute between India and Pakistan: Implication for the regional peace and stability in South Asia. *Journal of Interdisciplinary Insights*, 3(2), 24–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15769285>
- [7] Indonesia, C. (2019, August 16). *Dewan Keamanan PBB telah menerbitkan beberapa resolusi dalam sengketa Kashmir*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190816093305-113-421823>
- [8] Khaeruddin, & Nur Afdalia. (2021). Kashmir; sengketa perbatasan India-Pakistan dan analisis hukum internasional. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1).

- [9] Khairunnisa, B. W. (2021). Resolusi konflik Pakistan dan India dalam perebutan wilayah Kashmir dan peluang mediator bagi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 3(2), 114–126. <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2021.v03.i02.p04>
- [10] Mukti, D. A., & Puspitasari, A. (2020). Dampak konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir terhadap stabilitas keamanan Asia Selatan pada tahun 2016-2019. *Balcony: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 4(2), 103–114. Retrieved from <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/223>
- [11] Parveen, S. (2023). South Asian conflicts and regional security in the context of Pakistan-India relations: A political analysis. *Regional Lens*. <https://doi.org/10.62997/rl.2023a.23811>
- [12] Payapo. (2014). *Peran SAARC Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kashmir Antara India dan Pakistan*. Universitas Paramadina.
- [13] Rizki, K., & Muquita, N. R. P. (2023). Analisis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam sengketa wilayah perbatasan Kashmir. *Global Political Studies Journal*, 7(1), 88–100. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i1.9256>
- [14] Shah, M. (2025). The Kashmir conflict: How the India-Pakistan territorial dispute shapes China's regional security. *International Journal of Social Sciences Bulletin*.
- [15] Shamim, S. J., Nasim, M. M., & Ali, T. (2025). Indo-Pak conflict in South Asia: Dynamics of Kashmir issue and the way forward for peace. *Asian Journal of Politicology and Allied Studies (AJPAS)*. <https://doi.org/10.47264/idea.ajpas/2.1.1>
- [16] Vardiansyah, D. (2008). *Filsafat ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Jakarta: Indeks. ISBN 979-683-766-8.